



BUPATI BULUNGAN

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/1810/BKPSDM-IV/2023

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/495 Tahun 2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Bulungan akan melaksanakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang akan mengisi jabatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan sebagai berikut :

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;

7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Surat keterangan ini wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan pegawai ASN;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis kebutuhan jabatan;
11. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis kebutuhan jabatan dan menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Usia paling rendah untuk pelamar jabatan fungsional kesehatan adalah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat melamar;
13. Usia paling rendah untuk pelamar jabatan fungsional guru adalah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat melamar;
14. Usia paling rendah untuk pelamar jabatan fungsional Teknis adalah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh enam) tahun pada saat melamar;
15. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
16. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
17. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara dan lain-lain yang ditandatangani di atas *e-materai* 10.000 oleh calon pelamar (sesuai *Anak Lampiran IV Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019*) sebanyak 1 (satu) rangkap (format Surat Pernyataan dapat diunduh di laman <https://bkpsdm.bulungan.go.id>, media sosial IG & FB BKPSDM : [Bkpsdmbulungan](https://www.instagram.com/bkpsdmbulungan), dan <https://www.facebook.com/bkpsdmbulungan> dan <https://sscasn.bkn.go.id>).

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Setiap Pelamar wajib memiliki alamat surat email yang masih berlaku;
2. Surat lamaran ditandatangani ditujukan Kepada Bupati Bulungan (format surat lamaran dapat diunduh di <https://bkpsdm.bulungan.go.id>, media sosial IG & FB BKPSDM : [Bkpsdmbulungan](https://www.instagram.com/bkpsdmbulungan), dengan melampirkan:
 - a. Asli Ijazah dan transkrip nilai Perguruan Tinggi/STTB terakhir;
 - b. Asli Ijazah dan transkrip nilai Perguruan Tinggi/STTB terakhir sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Cetak asli bukti pendaftaran online;
 - d. Pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Sementara yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
3. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi, minimal 2.30 (dua koma tiga puluh) dibuktikan dengan transkrip nilai Perguruan Tinggi terakhir;
 4. Pelamar dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas diwajibkan melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya serta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
 5. Pelamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan *Insternship* sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
 6. Bagi pelamar pada kebutuhan jabatan fungsional Teknis wajib melampirkan persyaratan Tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Bagi pelamar jabatan fungsional Teknis yang mengisyaratkan persyaratan wajib tambahan berupa surat keterangan sehat, wajib melampirkan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas;
 8. Bagi pelamar pada kebutuhan jabatan fungsional Teknis dapat melampirkan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. Bagi pelamar pada kebutuhan umum jabatan fungsional guru melampirkan Sertifikat Pendidik (PPG);
 10. Dokumen-dokumen sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 sebagaimana tersebut di atas diunggah (upload) pada SSCASN BKN;
 11. **Khusus untuk Formasi dan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPJK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis :**
KRITERIA PELAMAR
 - a. Jenis Kebutuhan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja tahun 2023 terdiri atas :
 - 1) Kebutuhan Khusus meliputi :
Tenaga non Aparatur Sipil Negara (Non ASN).
 - 2) Kebutuhan Umum
Pelamar diluar Tenaga non Aparatur Sipil Negara (Non ASN).
 - b. Pelamar yang dapat melamar untuk mengikuti seleksi sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan dan Teknis pada Instansi Daerah Tahun 2023 terdiri atas kategori:
 - 1) **Pelamar Tenaga Honorer Kategori II**
Tenaga Honorer Kategori II merupakan Peserta yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintahan tempat bekerja saat mendaftar.

2) **Pelamar Tenaga Non ASN**

Pelamar Kriteria Tenaga non ASN merupakan pegawai yang melamar pada instansi pemerintahan tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintahan yang dilamar.

- c. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Paling singkat 2 (dua) tahun dalam jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan Ahli Pertama;
 - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang Ahli Muda;
 - 3) Pengalaman sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Human Resources Development (HRD)/Manajer.
- d. Pelamar penyandang Disabilitas yang dapat mendaftar pada kebutuhan jabatan Fungsional Kesehatan dan jabatan fungsional Teknis meliputi :
- a. Tuna Daksa (Kaki);
 - b. Tuna Rungu;
 - c. Tuna Wicara.

12. **Khusus untuk Formasi dan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru :**

KRITERIA PELAMAR

- a. Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja tahun 2023 terdiri atas :

1) Kebutuhan Khusus meliputi :

- Pelamar Prioritas;
- Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-2); dan
- Tenaga non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di sekolah negeri.

2) Kebutuhan Umum

Pelamar lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi dan yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- b. Pelamar yang dapat melamar untuk mengikuti seleksi sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2023 terdiri atas kategori:

1) **Pelamar Prioritas**

Pelamar Prioritas merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.

2) **Pelamar Tenaga Honorer Kategori II**

Pelamar Tenaga Honorer Kategori II merupakan Tenaga Honorer Kategori II, yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada badan Kepegawaian Negara.

3) **Pelamar Guru Non ASN**

Pelamar Guru Non ASN merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan minimal masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

4) **Pelamar Umum**

Pelamar Umum terdiri atas :

- a) Lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi;
- b) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- c. Pelamar penyandang disabilitas RUNGU tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Bahasa Inggris Ahli Pertama;
- d. Pelamar penyandang disabilitas DAKSA tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Ahli Pertama;
- e. Pelamar penyandang disabilitas NETRA tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama;
- f. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurut bagi :
 - 1) Pelamar prioritas;
 - 2) Eks THK-II;
 - 3) Guru Non ASN di sekolah negeri; dan
 - 4) Pelamar pada kebutuhan umum.

12. Persyaratan khusus lainnya yang dilengkapi kembali oleh pelamar **setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi CASN**, antara lain:

- a. Asli ijazah dan transkrip nilai Perguruan Tinggi/STTB terakhir dan fotokopi yang telah disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi;
- b. Asli Ijazah dan transkrip nilai Perguruan Tinggi/STTB terakhir sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pas foto dengan latar belakang berwarna merah ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 4X6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara dan lain-lain yang ditandatangani di atas *e-materai* 10.000 oleh calon pelamar (*sesuai Anak Lampiran IV Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019*);
- e. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Sementara yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta fotokopi;
- f. Asli dan fotokopi legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat yang masih berlaku;
- g. Asli dan fotokopi legalisir Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah setempat;

- h. Asli dan fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya) dari Rumah Sakit Pemerintah setempat;
 - i. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai Anak Lampiran III Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019.
13. Semua kelengkapan tersebut disusun rapi sesuai dengan urutan di atas dan dimasukkan ke dalam map berwarna yaitu:
1. HIJAU bagi pelamar jabatan fungsional GURU;
 2. KUNING bagi pelamar jabatan fungsional KESEHATAN;
 3. MERAH bagi pelamar jabatan fungsional TEKNIS;
 4. Pada bagian depan map ditulis:
 - 1) Nama;
 - 2) Pendidikan;
 - 3) Jabatan yang dilamar;
 - 4) Alamat lengkap sesuai yang tercantum pada KTP dan alamat lengkap selama mengikuti seleksi serta nomor telepon rumah/HP.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar seleksi penerimaan ASN Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2023, melakukan pendaftaran secara *online* pada alamat website Portal SSCASN 2023 pada <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Pada saat pendaftaran secara online, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman pendaftaran online tersebut;
3. Pelamar Seleksi Penerimaan pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2023 wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku;
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, calon pelamar Seleksi Penerimaan pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2023, wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon pelamar, Nomor Kartu Keluarga (KK), sesuai pada Kartu Keluarga (KK) calon pelamar;
5. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun calon peserta Seleksi pada Portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>) dilanjutkan dengan pendaftaran pada jenis jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman;
6. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan, apabila pelamar melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan dan/atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dalam mengisi formulir terdapat data yang tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat;

9. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) calon pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten bulungan sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
10. Pada halaman daftar pada tampilan SSCASN, pelamar mengisi dan membandingkan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan data Ijazah. Proses pemberkasan pegawai ASN menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari : Nama tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan mengisi data tersebut dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
11. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2023, selanjutnya pelamar harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2023. **Simpan Kartu tersebut dengan baik;**
12. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke <https://sscasn.bkn.go.id>, kemudian masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan PASSWORD yang telah didaftarkan, lalu tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
13. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran pada Instansi Daerah yang dituju;
14. Pilih jenis jabatan sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi Pemerintah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat pada Pengumuman;
15. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar pada Instansi Pemerintah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan;
16. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk dalam data base SSCASN 2023;
17. Setelah pelamar menyelesaikan pendaftaran *online*, pelamar **wajib** mengunggah semua berkas persyaratan yang telah ditentukan, dan mencetak **Tanda Bukti Pendaftaran online;**
18. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
19. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2023 dapat dilihat atau diunduh di laman <https://bkpsdm.bulungan.go.id>, media sosial IG & FB BKPSDM : [Bkpsdmbulungan](https://www.instagram.com/bkpsdmbulungan), dan <https://sscasn.bkn.go.id>

IV. PENYAMPAIAN BERKAS LAMARAN SECARA ONLINE

1. Pelamar mengunggah berkas/dokumen lamaran pada laman <https://sscasc.bkn.go.id>.
2. Berkas permohonan yang harus di UNGGAH pada saat pendaftaran :
 - a. Scan Kartu/tanda bukti pendaftaran Seleksi Penerimaan ASN Pemerintah Kabupaten Bulungan yang telah dicetak melalui portal Sistem Seleksi ASN 2023 pada website <http://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna merah;
 - c. Scan Asli KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan asli atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan instansi;
 - d. Scan Asli Ijazah sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset dan Teknologi bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri;
- e. Scan Asli Transkrip nilai, atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset dan Teknologi;
 - f. Scan Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara dan lain-lain yang ditandatangani di atas *e-materai* 10.000 oleh calon pelamar (sesuai *Anak Lampiran IV Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019*) sebanyak 1 (satu) rangkap (format Surat Pernyataan dapat diunduh di laman <https://bkpsdm.bulungan.go.id>, media sosial IG & FB BKPSDM : [Bkpsdmbulungan](https://www.instagram.com/bkpsdmbulungan), dan <https://sscasn.bkn.go.id>).
 - g. Scan asli surat lamaran yang ditandatangani ditujukan Kepada Bupati Bulungan dan ditandatangani diatas *e-materai*;
 - h. Scan Asli Surat Keterangan Pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada instansi pemerintah atau swasta yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direktur/Kepala Divisi yang membidangi HRD/Manajer;
 - i. Scan asli Surat Tanda Registrasi (STR) bagi jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) dikeluarkan lembaga profesi yang berwenang dan masih berlaku pada saat pendaftaran;
 - j. Bagi pelamar pada kebutuhan jabatan fungsional teknis wajib melampirkan persyaratan tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Bagi pelamar pada kebutuhan jabatan Fungsional Teknis dapat melampirkan Sertifikat Kompetensi sebagai tambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Bagi pelamar pada kebutuhan umum jabatan Fungsional Guru melampirkan Sertifikat Pendidik (PPG).
3. Pelamar yang dinyatakan lulus atau tidak lulus seleksi berkas administrasi dapat dilihat pada portal SSCASN BKN dengan ketentuan :
- a. Jika dinyatakan lulus seleksi berkas, pelamar dapat mencetak kartu peserta tes melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi diumumkan melalui SSCASN BKN.

V. PELAKSANAAN UJIAN

1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
2. Peserta tes Seleksi Kompetensi wajib hadir 2 (dua) jam sebelum tes dilaksanakan untuk registrasi dengan membawa persyaratan :
 - a. **KTP asli**;
 - b. **Kartu Peserta Tes asli**.
3. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a dan huruf b di atas, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;

4. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat pada situs *online* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan pada laman <https://bkpsdm.bulungan.go.id>, media sosial IG & FB BKPSDM : [Bkpsdmbulungan](#);
5. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
6. **Ketentuan Seleksi Kompetensi**
 - a. Seleksi Kompetensi menggunakan sistem CAT BKN yang diselenggarakan oleh BKN;
 - b. Seleksi Kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan;
 - c. Materi seleksi Kompetensi Teknis disusun oleh Instansi Pembina JF dan diintegrasikan kedalam bank soal CAT BKN;
 - d. Materi seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural disusun oleh tim penyusun naskah soal seleksi di bawah koordinasi Panselnas;
 - e. Pengisian kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Teknis terdiri dari :
 - 1) Peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik;
 - 2) Pengisian Kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II yang berperingkat terbaik;
 - 3) Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi oleh pelamar eks THK-II, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik;
 - 4) Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - 5) Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada Instansi Daerah, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda;
 - 6) Dalam hal masih terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi oleh peserta kebutuhan umum, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta kebutuhan khusus dengan memenuhi nilai ambang batas dan peringkat terbaik.
 - f. Pengisian jabatan Fungsional Guru terdiri dari :
 - 1) Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi kompetensi PPPK JF Guru tahun 2021;
 - 2) Peserta pada kebutuhan khusus yang dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - 3) Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - 4) Dalam hal masih terdapat kebutuhan umum Jabatan Fungsional Kesehatan dan Fungsional Teknis yang belum terpenuhi, maka

kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus dengan memenuhi ketentuan nilai ambang batas dan peringkat terbaik;

- 5) Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar pada pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.
7. Prinsip Penentu Kelulusan dan Masa Sanggah
 - a. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) dan/atau berperingkat terbaik;
 - b. Nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) dan kelulusan seleksi ditetapkan oleh Menteri;
 - c. Pelamar dapat diberikan penambahan nilai seleksi Kompetensi Teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri;
 - d. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi kompetensi dan wawancara dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi kompetensi dan wawancara diumumkan;
 - e. Sanggah diajukan melalui SSCASN;
 - f. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
 - g. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
 - h. Dalam hal kesalahan berasal dari pelamar, panitia seleksi instansi berhak untuk menolak sanggahan;
 - i. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus tahap akhir tidak melebihi jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi Pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - j. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CASN untuk periode berikutnya.

VI. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2023 selama 5 (lima) tahun. Dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

VII. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan ASN Tahun 2023 wajib menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
2. Tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi dan wawancara dilaksanakan di Laboratorium CAT Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara di Kantor Bupati Bulungan jalan Jelarai Tanjung Selor;
3. Pihak Pemerintah Kab/Kota tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Panselda Pengadaan ASN Tahun 2023, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;

4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan memberikan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Kelulusan peserta adalah prestasi dari peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain, dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat pihak-pihak yang melakukan pungutan, tawaran berupa apapun serta tindakan lainnya yang bertujuan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CASN Tahun 2023 hanya dapat dilihat pada situs *online* Portal SSCASN BKN dan website <https://bkpsdm.bulungan.go.id/>, media sosial IG & FB BKPSDM : [Bkpsdmbulungan](#);
7. Para pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut untuk melihat waktu dan tempat pelaksanaan ujian atau pengumuman penting lainnya;
8. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar memberikan keterangan dan/atau data yang tidak benar baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi calon PPPK dan PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Bulungan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai calon PPPK dan PPPK, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau digugurkan, maka Panitia dapat mengusulkan penggantinya kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Untuk mengikuti seluruh seleksi CASN 2023, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
11. Keputusan Tim Panselda Pengadaan CASN Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
12. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2023 <http://sscasn.bkn.go.id> dan website <https://bkpsdm.bulungan.go.id>, media sosial IG & FB BKPSDM : [Bkpsdmbulungan](#);
13. Pemberian penghasilan, khususnya Tunjangan Daerah kepada pelamar yang lulus seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian Tunjangan Daerah;
14. Ketentuan lainnya dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
 - 2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;

- 3) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023;
- 4) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang persyaratan wajib dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
- 5) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional tahun anggaran 2023;
- 6) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 tentang persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam jabatan fungsional kesehatan dalam pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional kesehatan tahun 2023.

VIII. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN PPPK TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s/d 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s/d 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s/d 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s/d 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s/d 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s/d 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s/d 26 Oktober 2023
8	Penarikan Data Final	27 s/d 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s/d 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s/d 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s/d 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s/d 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s/d 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s/d 13 Desember 2023

15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s/d 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s/d 11 Februari 2024

Tanjung Selor, 18 September 2023

BUPATI BULUNGAN,



SYARWANI

LAMPIRAN I
PENGUMUMAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR : 800.1.2.2/1810/BKPSDM IV/2023
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Contoh Format Surat Lamaran

(Diketik Komputer)

Huruf Kapital Jenis Font Arial ,Ukuran 12 Spasi 1.5

TANJUNG SELOR, 2023
KEPADA YTH :
BUPATI BULUNGAN
DI -
TANJUNG SELOR

SAYA YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI :

NAMA LENGKAP : ENDRI SUSANTI, S.Sos
NIK : 1234567891011123
TEMPAT LAHIR (KAB/KOTA) : BULUNGAN
TANGGAL LAHIR : 17 AGUSTUS 1990
JENIS KELAMIN : WANITA
AGAMA : ISLAM
PENDIDIKAN TERAKHIR : S.1 ADMINISTRASI NEGARA
IPK : 3.50
ALAMAT ASAL (KTP) : JL AGATIS NO. 1 RT. 02, RW. 03, KEL. TANJUNG SELOR
HILIR, KEC. TANJUNG SELOR, KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
ALAMAT DI TANJUNG SELOR : JL AGATIS NO. 1 RT. 02, RW. 03, KEL. TANJUNG SELOR
HILIR, KEC. TANJUNG SELOR, KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR TELPON/HP : 0852-1234-5678
EMAIL : sansan@gmail.com
JABATAN YANG DILAMAR : AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR
PENEMPATAN : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN BULUNGAN.

DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK, AGAR DAPAT DIANGKAT SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, DISAMPAIKAN DOKUMEN KELENGKAPAN YANG TELAH DIUNGGAH SEBAGAI BERIKUT:

1. PAS FOTO TERBARU MENGGUNAKAN PAKAIAN FORMAL DENGAN LATAR BELAKANG WARNA MERAH;
2. SCAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ASLI/SURAT KETERANGAN ASLI TELAH MELAKUKAN PEREKAMAN KEPENDUDUKAN YANG DIKELUARKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MASIH BERLAKU;
3. SCAN IJAZAH ASLI;
4. SCAN TRANSKRIP NILAI ASLI;
5. SCAN SURAT LAMARAN ASLI DITANDATANGANI DITUJUKAN KEPADA BUPATI BULUNGAN;
6. SCAN SURAT KETERANGAN PENGALAMAN DI BIDANG KERJA YANG RELEVAN DENGAN JABATAN FUNGSIONAL YANG DILAMAR SESUAI KETENTUAN;

7. BAGI PELAMAR/PENDAFTAR PADA FORMASI JABATAN KESEHATAN YANG MENSYARATKAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR), SCAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) ASLI YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA (MKTI)/MAJELIS TENAGA KESEHATAN PROVINSI (MTKP)/PEJABAT YANG BERWENANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
8. BAGI PELAMAR/PENDAFTAR PADA KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS WAJIB MELAMPIRKAN SCAN PERSYARATAN TAMBAHAN ASLI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
9. BAGI PELAMAR/PENDAFTAR PADA FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DAPAT MELAMPIRKAN SCAN SERTIFIKAT KOMPETENSI ASLI SEBAGAI TAMBAHAN NILAI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
10. BAGI PELAMAR/PENDAFTAR PADA FORMASI JABATAN GURU, JIKA ADA SERTIFIKAT PENDIDIK, SCAN SERTIFIKAT PENDIDIK ASLI YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
11. SCAN SURAT KETERANGAN RESMI ASLI DARI RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS YANG MENYATAKAN JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASANNYA.

SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA BERIKAN ADALAH BENAR. APABILA DIKEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI MEMBATALKAN KEIKUT SERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023.

ATAS PERHATIAN BAPAK, SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

MATERAI Rp 10.000,-

ENDRI SUSANTI, S.Sos

Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana Penjara

(Diketik Komputer)

Jenis Font Arial ,Ukuran 12 Spasi 1.5

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endri Susanti, S.Sos
Tempat dan Tanggal Lahir : Bulungan, 17 Agustus 1990
Agama : Islam
Alamat : Jl Agatis No. 1 RT. 02, RW. 03, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

HORMAT SAYA,

MATERAI Rp 10.000,-

ENDRI SUSANTI, S.Sos

KOP INSTANSI/LEMBAGA/PERUSAHAAN

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP*) :
Pangkat/Gol. Ruang*) :
Jabatan**) :
Instansi/Lembaga :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Jabatan :

adalah pegawai/karyawan/honorer di selama tahun bulan,
terhitung mulai tanggal sampai tanggal

Adapun yang bersangkutan memiliki uraian tugas, sebagai berikut :

1.
2.
3. dst.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk memenuhi persyaratan pelamaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Kabupaten Bulungan dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terbukti surat keterangan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(kota), (tanggal) (bulan) 2023
Nama Jabatan Penandatanganan**),

(ttd+cap stempel basah)

(Nama Pejabat Penandatanganan)

*) Dihapus jika pelamar bukan dari instansi pemerintah

**) Diisi dengan nama jabatan Kepala Perangkat Daerah bagi Instansi Pemerintah atau Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Human Resources Development (HRD)/Manajer bagi Non Pemerintah

LAMPIRAN II
 PENGUMUMAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR: 800.1.2.2/1810/BKPSDM-IV/2023
 TENTANG
 SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA GURU

NO.	NAMA JABATAN	UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI	ALOKASI FORMASI
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	UMUM	1
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	UMUM	1
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	UMUM	1
4	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	UMUM	3
5	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	UMUM	6
6	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	UMUM	2
7	AHLI PERTAMA - GURU IPA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	UMUM	5
8	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DISABILITAS	2
9	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	UMUM	57
10	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	UMUM	10
11	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	UMUM	10
12	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	UMUM	2
TOTAL				100

TENAGA KESEHATAN

NO.	NAMAJABATAN	UNITPENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	ALOKASI FORMASI
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANAK	UMUM	1
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	PROFESI DOKTER SPESIALIS BEDAH	UMUM	1
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS LONG BELUAH	PROFESI APOTEKER	KHUSUS	1
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS BUNYU	PROFESI APOTEKER	KHUSUS	1
5	AHLI PERTAMA - APOTEKER	RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	PROFESI APOTEKER	KHUSUS	1
6	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PUSKESMAS LONG BIA	PROFESI APOTEKER	UMUM	1
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS LONG BIA	PROFESI DOKTER	KHUSUS	1
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	PROFESI DOKTER	KHUSUS	1
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS TANAH KUNING	PROFESI DOKTER	KHUSUS	1
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS BUNYU	PROFESI DOKTER	KHUSUS	1
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	PROFESI DOKTER	UMUM	1
12	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS LONG BELUAH	PROFESI DOKTER	KHUSUS	1
13	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS PIMPING	PROFESI DOKTER	KHUSUS	1
14	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS LONG BANG	PROFESI DOKTER	UMUM	1
15	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS SEKATAK BUJI	PROFESI DOKTER	KHUSUS	1
16	AHLI PERTAMA - DOKTER	PUSKESMAS LONG BANG	PROFESI DOKTER	KHUSUS	1
17	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS BUNYU	PROFESI DOKTER GIGI	KHUSUS	1
18	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS LONG BANG	PROFESI DOKTER GIGI	UMUM	1

19	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS SALIMBATU	PROFESI DOKTER GIGI	KHUSUS	1
20	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS TANJUNG PALAS	PROFESI DOKTER GIGI	KHUSUS	1
21	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS PIMPING	PROFESI DOKTER GIGI	KHUSUS	1
22	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PUSKESMAS LONG BELUAH	PROFESI DOKTER GIGI	KHUSUS	1
23	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS SALIMBATU	S-1 EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	KHUSUS	1
24	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS LONG BANG	S-1 EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	UMUM	1
25	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	PUSKESMAS PIMPING	S-1 EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	KHUSUS	1
26	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	PUSKESMAS LONG BELUAH	D-IV GIZI / S-1 GIZI	KHUSUS	1
27	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	PUSKESMAS TANAH KUNING	D-IV GIZI / S-1 GIZI	KHUSUS	1
28	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	PUSKESMAS SEKATAK BUJI	D-IV GIZI / S-1 GIZI	KHUSUS	1
29	AHLI PERTAMA - PERAWAT	RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	PROFESINERS	KHUSUS	2
30	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS LONG BELUAH	PROFESINERS	KHUSUS	1
31	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS BUNYU	PROFESINERS	KHUSUS	2
32	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PUSKESMAS LONG BANG	PROFESINERS	KHUSUS	1
33	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS LONG BELUAH	D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	UMUM	1

34	AHLI PERTAMA - TENAGAPROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMASTANAH KUNING	D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	KHUSUS	1
35	AHLI PERTAMA - TENAGAPROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PUSKESMAS LONG BANG	D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	UMUM	1
36	AHLI PERTAMA - TENAGASANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMASLONG BELUAH	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN ATAU SANITASI LINGKUNGAN	UMUM	1
37	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	D-III FARMASI	DISABILITAS	1
38	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	PUSKESMASBUNYU	D-III FARMASI	KHUSUS	1
39	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	PUSKESMASSEKATAK BUJI	D-III FARMASI	KHUSUS	1
40	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	PUSKESMASLONG BELUAH	D-III FARMASI	KHUSUS	1
41	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS LONG BIA	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	4
42	TERAMPIL - BIDAN	RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	1
43	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS LONG BIA	D-III KEBIDANAN	UMUM	4
44	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMASTANAH KUNING	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	5
45	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS LONG BANG	D-III KEBIDANAN	UMUM	1
46	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMASLONG BELUAH	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	4
47	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMAS SALIMBATU	D-III KEBIDANAN	KHUSUS	3
48	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMASSEKATAK BUJI	D-III KEBIDANAN	UMUM	3

49	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMASBUNYU	D-IIIKEBIDANAN	KHUSUS	2
50	TERAMPIL - BIDAN	PUSKESMASSEKATAK BUJI	D-IIIKEBIDANAN	KHUSUS	6
51	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	D-III FISIOTERAPI	KHUSUS	1
52	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMASBUNYU	D-III GIZI	KHUSUS	1
53	TERAMPIL - NUTRISIONIS	RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	D-III GIZI	KHUSUS	1
54	TERAMPIL - NUTRISIONIS	PUSKESMAS LONG BIA	D-III GIZI	UMUM	1
55	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS LONG BANG	D-IIIKEPERAWATAN	KHUSUS	3
56	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMASBUNYU	D-IIIKEPERAWATAN	KHUSUS	4
57	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS LONG BIA	D-IIIKEPERAWATAN	UMUM	4
58	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS SALIMBATU	D-IIIKEPERAWATAN	KHUSUS	2
59	TERAMPIL - PERAWAT	RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	D-IIIKEPERAWATAN	KHUSUS	2
60	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMASLONG BELUAH	D-IIIKEPERAWATAN	UMUM	1
61	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMASPIMPING	D-IIIKEPERAWATAN	KHUSUS	1
62	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMASSEKATAK BUJI	D-IIIKEPERAWATAN	UMUM	1
63	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMASSEKATAK BUJI	D-IIIKEPERAWATAN	KHUSUS	8
64	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMASLONG BELUAH	D-IIIKEPERAWATAN	KHUSUS	6
65	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS LONG BIA	D-IIIKEPERAWATAN	KHUSUS	7
66	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMASTANAH KUNING	D-IIIKEPERAWATAN	KHUSUS	5
67	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS LONG BANG	D-IIIKEPERAWATAN	UMUM	2

68	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	PUSKESMAS BUMI RAHAYU	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIS / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	DISABILITAS	1
69	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIS / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	KHUSUS	1
70	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS LONG BANG	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KHUSUS	1
71	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KHUSUS	1
72	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS BUNYU	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KHUSUS	1
73	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS TANAH KUNING	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KHUSUS	1
74	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS BUNYU	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	UMUM	1
75	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS LONG BELUAH	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KHUSUS	1
76	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS LONG BIA	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KHUSUS	1
77	TERAMPIL - RADIOGRAFER	RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	D-III RADIOLOGI	KHUSUS	2
78	TERAMPIL - RADIOGRAFER	RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	D-III RADIOLOGI	UMUM	1
79	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS BUNYU	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	KHUSUS	1
80	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PUSKESMAS SEKATAK BUJI	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	KHUSUS	1
81	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	PUSKESMAS BUNYU	D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	KHUSUS	1

82	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	PUSKESMAS LONG BIA	D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	KHUSUS	1
83	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	PUSKESMASSEKATAK BUJI	D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	KHUSUS	1
TOTAL				142	

TENAGA TEKNIS

NO.	NAMAJABATAN	UNITPENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	ALOKASI FORMASI
1	AHLI PERTAMA - ANALIS AKUAKULTUR	DINASPERIKANAN	S-1 SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 PERIKANAN BUDIDAYA / D-IV TEKNOLOGI AKUAKULTUR / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 AKUAKULTUR / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA	KHUSUS	1
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK LISTRIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI	KHUSUS	1
3	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 SOSIOLOGIS / D-IV MANAJEMEN / D-IV PSIKOLOGI / D-IV TEKNIK GEOLOGI / D-IV GEOGRAFI / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV PLANOLOGI / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV STATISTIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV SOSIOLOGI / D-IV ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 STATISTIK / S-1 GEOGRAFI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PLANOLOGI	KHUSUS	1
4	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	DINASKETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PANGAN / S-1 ILMU GIZI / GIZI MASYARAKAT / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU PERTANIAN	UMUM	2

5	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	DINASKETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PANGAN / S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU PERTANIAN	DISABILITAS	1
6	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	DINASKETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PANGAN / S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU PERTANIAN	KHUSUS	3
7	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	DINASKESEHATAN	S-1 STUDI PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV POLITIK PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	KHUSUS	1
8	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	S-1 STUDI PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV POLITIK PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	KHUSUS	1

9	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	S-1 KEARSIPAN DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU EKONOMI / D-IV ILMU SOSIAL POLITIK / D-IV ARSIPARIS / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / D-IV ARSIP / S-1 ARSIPARIS / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ARSIP / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU SOSIAL POLITIK / S-1 KEARSIPAN / S-1 MANAJEMEN PEMBANGUNAN	KHUSUS	1
10	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	S-1 KEARSIPAN DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV HUKUM / D-IV ARSIPARIS / D-IV KEARSIPAN / D-IV SOSIAL POLITIK / D- IV ARSIP / S-1 ARSIPARIS / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ARSIP / S-1 HUKUM / S-1 SOSIAL POLITIK / S-1 KEARSIPAN / S-1 MANAJEMEN PEMBANGUNAN	KHUSUS	1
11	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH	S-1 MANAJEMEN / S-1 KEARSIPAN DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D- IV MANAJEMEN / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU HUKUM / D-IV HUKUM / D-IV MANAJEMEN SDM / D- IV ARSIPARIS / D-IV SOSIAL / D-IV KEARSIPAN / D-IV SOSIAL POLITIK / D- IV POLITIK / D-IV ARSIP / S-1 ARSIPARIS / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN SDM / S-1 POLITIK / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ARSIP / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 SOSIAL / S-1 SOSIAL POLITIK / S-1 KEARSIPAN / S-1 MANAJEMEN PEMBANGUNAN	KHUSUS	1

12	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	BADANPENDAPATAN DAERAH	S-1 KEARSIPAN DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU EKONOMI / D-IV ILMU SOSIAL POLITIK / D-IV HUKUM / D-IV ARSIPARIS / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / D-IV ARSIP / S-1 ARSIPARIS / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ARSIP / S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU SOSIAL POLITIK / S-1 KEARSIPAN / S-1 MANAJEMEN PEMBANGUNAN	KHUSUS	1
13	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	DINASKESEHATAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 KEARSIPAN DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV MANAJEMEN / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU HUKUM / D-IV HUKUM / D-IV MANAJEMEN SDM / D-IV EKONOMI / D-IV ARSIPARIS / D-IV SOSIAL / D-IV KEARSIPAN / D-IV SOSIAL POLITIK / D-IV POLITIK / D-IV ARSIP / S-1 ARSIPARIS / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN SDM / S-1 POLITIK / S-1 EKONOMI / S-1 ARSIP / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 SOSIAL / S-1 SOSIAL POLITIK / S-1 KEARSIPAN	KHUSUS	2
14	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DINASPERTANIAN	S-2 DOKTER HEWAN / PROFESI DOKTER HEWAN	UMUM	4
15	AHLI PERTAMA - PAMONGBUDAYA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	S-1 SENI DRAMA TARI DAN MUSIK / S-1 SENI PERTUNJUKAN / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 FILM DAN TELEVISI / S-1 SENI RUPA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 DESAIN INTERIOR / S-1 SENI TARI / S-1 SENI MUSIK / S-1 SASTRA DAERAH / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 ARKEOLOGI / S-1 SEJARAH / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 ETNOMUSIKOLOGI / S-1 SENI TEATER / D-IV FILM DAN TELEVISI	DISABILITAS	1

16	AHLI PERTAMA - PEKERJASOSIAL	DINAS PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PEKERJAAN SOSIAL	UMUM	2
17	AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	D-IV TEKNIK INDUSTRI / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNIK INSTRUMENTASI DAN KONTROL / S-1 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN KONTROL / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK ELEKTRO	UMUM	1
18	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D-IV MANAJEMEN BENCANA / S-1 MANAJEMEN BENCANA / D-IV MANAJEMEN / D-IV PSIKOLOGI / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK GEOLOGI / D-IV ILMU HUKUM / D-IV GEOGRAFI / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV PLANOLOGI / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV STATISTIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV SOSIOLOGI / D-IV ILMU KESEHATAN MASYARAKAT / D-IV ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 STATISTIK / S-1 GEOGRAFI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PLANOLOGI	UMUM	1
19	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK GEOMATIKA / S-1 GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA	KHUSUS	2

20	AHLI PERTAMA - PENERA	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S-1 MATEMATIKA / S-1 FISIKA / S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 TEKNIK MESIN / S- 1 TEKNIK ELEKTRO	UMUM	1
21	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU EKONOMI / D-IV PSIKOLOGI / D-IV HUKUM / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S- 1 ILMU EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	KHUSUS	1
22	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	D-IV TEKNIK MESIN / D-IV MEKANISASI PERTANIAN / D-IV TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 MEKANISASI PERTANIAN / S-1 ALAT/ALAT PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 TEKNIK MESIN	UMUM	1
23	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S-1 ILMU EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM	KHUSUS	1
24	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	SEKRETARIAT DAERAH	D-IV EKONOMI / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / D-IV TEKNIK / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV AKUNTANSI / S-1 ILMU AKUNTANSI / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM PEMERINTAHAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM ISLAM / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN EKONOMI / S-1 AKUNTANSI EKONOMI	KHUSUS	5

25	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	DINASLINGKUNGAN HIDUP	S-1 SANITASI LINGKUNGAN / S-1 BIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI MASYARAKAT / S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN / S-1 MATEMATIKA / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 HUMANIORA	KHUSUS	2
26	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 MANAJEMEN EKONOMI	KHUSUS	1
27	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN EKONOMI	KHUSUS	1
28	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	DINASPERTANIAN	D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA / S-1 MANAJEMEN AGROBISNIS / D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN / D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 AGROBISNIS / D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN / S-1 TANAMAN PANGAN / S-1 ILMU TANAH / S-1 AGRONOMI / S 1 PENYULUH PERTANIAN / S-1 MEKANISASI PERTANIAN / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 PEMULIAAN TANAMAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 PERKEBUNAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 AGROTEKNOLOGI	KHUSUS	10
29	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	DINAS SOSIAL	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PEKERJAAN SOSIAL	UMUM	1

30	AHLI PERTAMA - PERENCANA	BADANPENDAPATAN DAERAH	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV HUKUM / D-IV EKONOMI / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV TEKNIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	KHUSUS	1
31	AHLI PERTAMA - PERENCANA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU HUKUM / D-IV HUKUM / D-IV EKONOMI / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV TEKNIK / D-IV SOSIAL DAN POLITIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 SOSIAL DAN POLITIK	KHUSUS	1
32	AHLI PERTAMA - PERENCANA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU HUKUM / D-IV HUKUM / D-IV EKONOMI / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV TEKNIK / D-IV SOSIAL DAN POLITIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 SOSIAL DAN POLITIK	KHUSUS	1
33	AHLI PERTAMA - PERENCANA	DINAS SOSIAL	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU HUKUM / D-IV HUKUM / D-IV EKONOMI / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV TEKNIK / D-IV SOSIAL DAN POLITIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 MANAJEMEN PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 SOSIAL DAN POLITIK	KHUSUS	1

34	AHLI PERTAMA - PERENCANA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU HUKUM / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV TEKNIK / D-IV SOSIAL POLITIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 SOSIAL POLITIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	KHUSUS	1
35	AHLI PERTAMA - PERENCANA	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV HUKUM / D-IV EKONOMI / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV TEKNIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	KHUSUS	1
36	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	DINASKOMUNIKASI, INFORMATIKADAN PERSANDIAN	D-IV MANAJEMEN / D-IV ILMU KOMUNIKASI / D-IV HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-IV MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	KHUSUS	1
37	AHLI PERTAMA - PRANATAKOMPUTER	BADAN KEPEGAWAIAN DANPENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA	KHUSUS	1

38	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA	KHUSUS	1
39	PEMULA - PARAMEDIK VETERINER	DINAS PERTANIAN	SMK PERTANIAN PROGRAM AGROBISNIS TERNAK RUMINANSIA / SMK AGROBISNIS PRODUKSI TERNAK / SEKOLAH PENGAMAT KEHEWANAN / SEKOLAH PETERNAKAN MENENGAH ATAS / SMK PETERNAKAN / SPP PETERNAKAN	UMUM	1
40	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	KHUSUS	6
41	PEMULA - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	DINAS PERHUBUNGAN	SMA IPA / SMK MESIN / SMK OTOMOTIF / SMK ELEKTRO	KHUSUS	1
42	TERAMPIL - ARSIPARIS	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	D-III KEARSIPAN/KEPERPUSTAKAAN / D-III PEMERINTAHAN / D-III SOSIAL EKONOMI / D-III KEARSIPAN DIGITAL / D-III ARSIP / D-III EKONOMI / D-III EKONOMI PEMBANGUNAN / D-III EKONOMI MANAJEMEN / D-III EKONOMI AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III SEKRETARIS MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III SOSIAL POLITIK / D-III SOSIAL / D-III TEKNIK / D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III ARSIPARIS / D-III SEKRETARIS PERKANTORAN / D-III HUKUM	KHUSUS	1

43	TERAMPIL - ARSIPARIS	DINAS PERHUBUNGAN	D-III KEARSIPAN/KEPERPUSTAKAAN / D-III PEMERINTAHAN / D-III ILMU EKONOMI / D-III SOSIAL POLITIK KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN DIGITAL / D-III ARSIP / D-III ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / D-III EKONOMI / D-III EKONOMI MANAJEMEN / D-III EKONOMI AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III KEARSIPAN / D-III ILMU SOSIAL / D-III ARSIPARIS / D-III HUKUM	KHUSUS	1
44	TERAMPIL - ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	D-III ILMU KELAUTAN / D-III SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / D-III TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN / D-III TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN	UMUM	1
45	TERAMPIL - ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERIKANAN	D-III PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN / D-III TEKNOLOGI PENANGKAPAN / D-III TEKNOLOGI HASIL KELAUTAN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN / D-III TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN / D-III TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN / D-III KELAUTAN / D-III TEKNIK PERKAPALAN / D-III PERKAPALAN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN / D-III PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN	UMUM	1
46	TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	DINAS PERHUBUNGAN	D-III PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	UMUM	1
47	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	D-III PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN / D-III PEMULIAAN TANAMAN / D-III HAMA PENYAKIT TUMBUHAN / D-III ILMU TANAH / D-III TANAMAN PANGAN / D-III MANAJEMEN AGROBISNIS / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN / D-III PROTEKSI TANAMAN / D-III AGROBISNIS / D-III TEKNIK PERTANIAN / D-III AGROTEKNOLOGI / D-III AGRONOMI / D-III BUDIDAYA PERTANIAN / D-III PENYULUH PERTANIAN / D-III PERKEBUNAN / D-III SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / D-III MEKANISASI PERTANIAN	UMUM	3

48	TERAMPIL - TEKNISI AKUAKULTUR	DINAS PERIKANAN	D-III PERIKANAN BUDIDAYA / D-III LINGKUNGAN / D-III BIOLOGI / D-III KIMIA	UMUM	1
TOTAL				78	

BUPATI BULUNGAN,

